

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi atau *agency theory* pertama kali dikenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 (Artati, 2016). Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* sebagai pemegang saham atau pemilik, sedangkan *agent* merupakan manajemen perusahaan (Efwita dan NR, 2019). Alfian dan Suransyah (2017) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan kepada agen.

Menurut Putra, dkk (2014), *agency theory* dilandasi oleh tiga buah asumsi, antara lain:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian ialah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*) antara *principal* dan *agent*.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Berdasarkan tiga asumsi tersebut maka akan memicu terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Ikhsan, dkk, 2015). Pemegang saham memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan imbal balik yang maksimal. Sedangkan agen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Masalah yang timbul dari benturan kepentingan ini disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*) (Alijoyo dan Zaini, 2004).

*Agency problem* akan meningkat sehubungan dengan ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan yang semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan dan tingkat kompleksitas perusahaan dapat meningkatkan risiko terjadinya *moral hazard* dalam perusahaan. *Moral hazard* terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menyebabkan kerugian bagi pemilik (Alfian dan Suryansyah, 2017).

Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan fungsi monitoring melalui auditor eksternal yang berkualitas, baik untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan (*fraund*) maupun dalam hal penyajian laporan keuangan (Trisnawati, 2015).

Masalah keagenan juga terjadi karena adanya asimetri informasi dimana manajemen mempunyai *diskresi* untuk menentukan informasi yang mana yang akan disebar dan dipublikasikan kepada pihak eksternal (termasuk pemegang saham) dan mana yang akan disimpan untuk konsumsi pihak internal. Untuk mengatasi informasi asimetri ini, pemegang saham menunjuk dewan komisaris independen sebagai perwakilan mereka untuk mengawasi aktivitas manajemen. Komisaris independen adalah elemen *good corporate governance* yang mewakili pemegang saham, maka mereka memiliki ekspektasi yang tinggi bagi manajemen agar memberikan informasi yang andal bagi investor. Komisaris independen akan menghendaki adanya pengawasan yang baik yang berasal dari pihak independen, yang diwujudkan dengan pemilihan auditor eksternal yang berkualitas (Setiawan, dkk, 2015).

Mekanisme internal lainnya yang dapat digunakan ialah membentuk komite audit. Salah satu tugas komite audit adalah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada dewan komisaris, yang kemudian dipertimbangkan dan disetujui melalui rapat umum pemegang saham. Efektivitas komite

audit dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: aktivitas, ukuran, dan kompetensi. Ketika perusahaan memiliki skor efektivitas komite audit yang tinggi maka mereka akan merekomendasikan auditor yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang tinggi kepada dewan komisaris untuk bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Alfian & Suryansyah, 2017).

Pratama dan Syafruddin (2013) menjelaskan bahwa masalah keagenan yang terjadi karena konflik kepentingan dan asimetri informasi akan memunculkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dapat dibagi dalam tiga jenis biaya, antara lain:

- a. Biaya Monitoring (*monitoring cost*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- b. Biaya Bonding (*bonding cost*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberi jaminan bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal atau dengan kata lain biaya untuk meyakinkan agen, bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
- c. Biaya Kerugian Residual (*residual cost*) adalah nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat dari perbedaan kepentingan.

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost* atau biaya keagenan. Salah satunya adalah kepemilikan saham oleh manajemen atau kepemilikan manajerial. Jika terdapat kepemilikan manajerial di perusahaan maka akan berakibat pada rendahnya permintaan pengawasan melalui auditor yang berkualitas (Pratama dan Syafruddin, 2013).

## 2. **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Subagyo, Masruroh & Bastian, 2018). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer dari perusahaan itu sendiri atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Artati, 2016).

Menurut Dewi dan Ratnadi (2014) kepemilikan manajerial adalah investasi ke perusahaan oleh pihak manajemen perusahaan, direksi perusahaan, atau pihak yang mendapatkan kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk presentase. Proksi kepemilikan manajerial

adalah dengan menggunakan presentase kepemilikan manajer, komisaris dan direksi terhadap jumlah total saham yang beredar (Puspaningrum, 2017).

### **3. Komisaris Independen**

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseoran yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris tidak memegang jabatan direksi sehingga dewan komisaris bisa menjalankan fungsi pengawasan internal tanpa perlu memiliki bias dari pihak manajemen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) Dewan Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavanda, 2006).

Menurut Weisbach yang dikemukakan oleh Arifin (2005), komisaris independen dalam suatu perusahaan harus benar-benar independen sehingga mampu menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk itu komisaris independen perusahaan merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi. Komisaris independen diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris independen pada suatu perusahaan.

#### **4. Komite Audit**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Balafif (2010), terbentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *corporate governance* yang mulai dijalankan dengan baik. Tugas utama dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan.

Memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit internal yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan, sedangkan kedua lainnya eksternal. Dapat diartikan pula komite audit merupakan alat untuk memperkuat independensi auditor (Samsul, 2006). Menurut Hermawan (2009) efektivitas peran komite audit dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yaitu: independensi, aktivitas, ukuran dan kompetensi komite audit.

#### **5. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda (Sawir, 2004). Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, total penjualan dan nilai pasar (Hery, 2017). Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat diukur dengan logaritma

natural ( $L_n$ ) dari rata-rata total aset perusahaan. Penggunaan total aset berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu (Harahap, 2007).

Menurut Dewi & Ratnadi (2014), ukuran perusahaan menunjukkan ukuran besar atau kecilnya perusahaan. Semakin besar skala suatu perusahaan maka semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi, sehingga pengawasan yang khusus akan diperlukan. Semakin besar aset, omzet, modal ataupun jumlah karyawan menunjukkan semakin kompleks kegiatan dalam perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan akan semakin sulit dalam mengendalikan perusahaan sehingga semakin besar peluang terjadinya penyimpangan baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (Dewi & Ratnadi, 2014).

## **6. Pemilihan Auditor Eksternal**

Audit adalah sebuah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002).

Abdul Halim (2003) membagi audit menjadi tiga bagian berdasarkan pada siapa pelaksana audit:

- a. Audit Eksternal, merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen yaitu akuntan publik atau kantor akuntan publik yang telah diakui oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Audit eksternal pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.
- b. Audit Internal, suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi informasi yang dihasilkan, ditunjukkan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor internal merupakan karyawan dari organisasi tersebut. Audit internal bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh organisasi.
- c. Audit Sektor Publik, suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, contohnya pemerintah pusat maupun daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan maupun audit operasional. Auditornya merupakan auditor pemerintah.

Menurut Balafif (2010), audit eksternal dilakukan untuk memastikan bahwa suatu laporan keuangan sebuah perusahaan dengan benar disajikan. Para auditor eksternal ini tidak melibatkan akuntansi yang sebenarnya dari sebuah bisnis atau laporan keuangan perusahaan, melainkan hanya melakukan review dokumen keuangan yang diberikan kepada auditor secara independen. Auditor harus mempertahankan kualitas audit yang dilakukannya selama proses pengauditan. Berbicara kualitas audit, Fitriyani & Erawati (2016) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien.

Temuan pelanggaran dalam sistem akuntansi berhubungan dengan pengetahuan serta kemampuan auditor, sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung pada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran. Dorongan ini akan bergantung pada independensi yang dimiliki oleh seorang auditor. Jika seorang auditor dianggap tidak memiliki independensi oleh para pengguna laporan keuangan, maka pendapat auditor dalam laporan audit tidak akan memberikan nilai kepada para pengguna laporan keuangan (Meutia, 2004).

Audit yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fitriyani & Erawati (2016) menggunakan ukuran KAP sebagai *proxy* untuk mengukur kualitas audit. Semakin besar ukuran KAP, semakin besar pula sumber daya yang dimilikinya untuk melaksanakan audit.

Kemampuan teknologi, prosedur dan sampling yang digunakan tentu membutuhkan biaya yang besar. KAP yang ukurannya tidak terlalu besar akan mengalami kesulitan. Berbeda dengan KAP besar yang memiliki banyak klien. Perusahaan yang menggunakan auditor berkualitas tinggi akan membayar *fee* yang lebih besar untuk memastikan kehandalan laporan keuangan.

Oleh sebab itu KAP besar yang sudah mempunyai banyak klien akan mengalami kerugian reputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang berukuran kecil jika tidak menyediakan jasa audit yang berkualitas. Tidak hanya merusak reputasi dan kredibilitas KAP, tetapi juga berimbas pada pendapatan dan kepercayaan klien terhadap KAP besar akan menurun. Oleh sebab itu, KAP besar akan cenderung untuk menyediakan kualitas audit yang tinggi, karena kerugian yang akan didapatkannya lebih besar jika tidak menyediakan kualitas seperti yang dijanjikan. KAP besar juga akan merekrut karyawan dengan keahlian dan pengalaman diatas rata-rata.

*Proxy* lainnya yang dapat digunakan adalah kompetensi auditor. Zureigat (2011) menemukan bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi kualitas audit adalah pengetahuan auditor dalam bidang akuntansi dan audit. Kemampuan auditor untuk menginformasikan kepada klien mengenai perubahan akuntansi, komitmen auditor terhadap kode etik, serta pengetahuan auditor

terhadap industri. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman auditor, objektivitas, serta kualifikasi akademis auditor.

Banyaknya *proxy* yang digunakan untuk menjelaskan dan mengukur kualitas audit mencerminkan bahwa aspek kualitas audit sangat luas. Ada aspek yang menjelaskan kualitas audit dari sisi internal KAP, seperti kompetensi auditor, pengalaman, serta spesialisasi industri. Tidak hanya dari sisi internal, dari sisi eksternal kualitas audit dapat dijelaskan melalui ukuran KAP, reputasi dan nama baik KAP, dan juga hubungan auditor dengan klien. Namun kedua aspek ini sebenarnya saling mengisi dan memiliki hubungan timbal balik. Seiring dengan kompetensi, keahlian dan pengalaman yang semakin tinggi membuat nama baik KAP semakin meningkat dan akan menciptakan permintaan jasa audit yang banyak. Dampaknya adalah pendapatan dan pangsa pasar KAP akan semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam kualitas jasa audit dapat dilihat dari ukuran KAP, reputasi atau nama baik KAP, pangsa pasar dan keahlian teknis. Hal tersebut yang membedakan auditor eksternal berkualitas tinggi atau rendah.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Sulistiyawati dan Agustina, 2019	Variabel independen: <i>Good Corporate Governance, Company's Size, Profitability, Leverage, Audit Fee</i>  Variabel dependen: <i>The Selection of External Auditor</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good corporate governance, leverage, audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>the selection of external auditor</i> . Sedangkan <i>company's size dan profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>the selection of external auditor</i> .
2.	Efwita dan NR, 2019	Variabel independen: Dewan Komisaris, Efektivitas Komite Audit, Dewan Direksi  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sementara dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.
3.	Alfian dan Suransyah, 2017	Variabel independen: Efektivitas Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.
4.	Sumantaningrum dan Kiswara, 2017	Variabel independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing  Variabel dependen: Kualitas Audit	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
5.	Habeahan dan Habibi Z, 2017	Variabel independen: Kepemilikan Saham Terbesar, Ukuran Dewan Komisaris, Efektivitas Komite Audit, Tipe Kepemilikan Saham  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Kepemilikan saham terbesar & ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan efektivitas komite audit dan tipe kepemilikan saham berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor eksternal.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
6.	Rosita, Respati dan Sondakh, 2017	Variabel independen: Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, Efektivitas Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i>  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan komisaris independen dan efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.
7.	Fitriyani dan Erawati, 2016	Variabel independen: <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sementara <i>good corporate governance</i> , ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal
8.	Artati, 2016	Variabel independen: Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional  Variabel dependen: Kualitas Audit	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sementara komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
9.	Nafasati P dan Indudewi, 2015	Variabel independen: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Efektivitas Komite Audit, Kepemilikan Saham  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan komisaris independen dan kepemilikan saham terbesar tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.
10.	Setiawan, Karsana, Budi dan Armon, 2015	Variabel independen: Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, <i>Leverage</i>  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
11.	Trisnawati, 2015	Variabel independen: Efektivitas Komite Audit, Kompleksitas Perusahaan, Kebutuhan Pendanaan Eksternal, <i>Leverage</i>  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal yang Berkualitas	Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Kompleksitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan kebutuhan pendanaan eksternal dan leverage tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.
12.	Dewi dan Ratnadi, 2014	Variabel independen: Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan  Variabel dependen: Pemilihan Kantor Akuntan Publik	Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik.
13.	Putra, 2014	Variabel independen: Kepemilikan Saham Instritusalional, Kepemilikan Saham Manajerial, ukuran Dewan Komisaris dan Efektivitas Komite Audit  Variabel dependen: Pemilihan auditor eksternal	Ukuran dewan komisaris, efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan kepemilikan instritusalional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.
14.	Putra, Puspa dan Herawati, 2014	Variabel independen: Kepemilikan Saham Terbesar, Efektivitas Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Keluarga  Variabel dependen: Pemilihan Auditor Eksternal	Kepemilikan saham terbesar dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan efektivitas komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.
15.	Pratama dan Syafuruddin, 2013	Variabel independen: Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Variabel dependen: Kualitas Audit	Konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

### C. Kerangka Pemikiran

Artanti (2016) menjelaskan kepemilikan manajerial merupakan investasi ke perusahaan oleh pihak manajemen perusahaan, direksi perusahaan atau pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi *agency cost*, sehingga kualitas audit eksternal yang dibutuhkan oleh perusahaan akan menurun atau rendah (Artati, 2016).

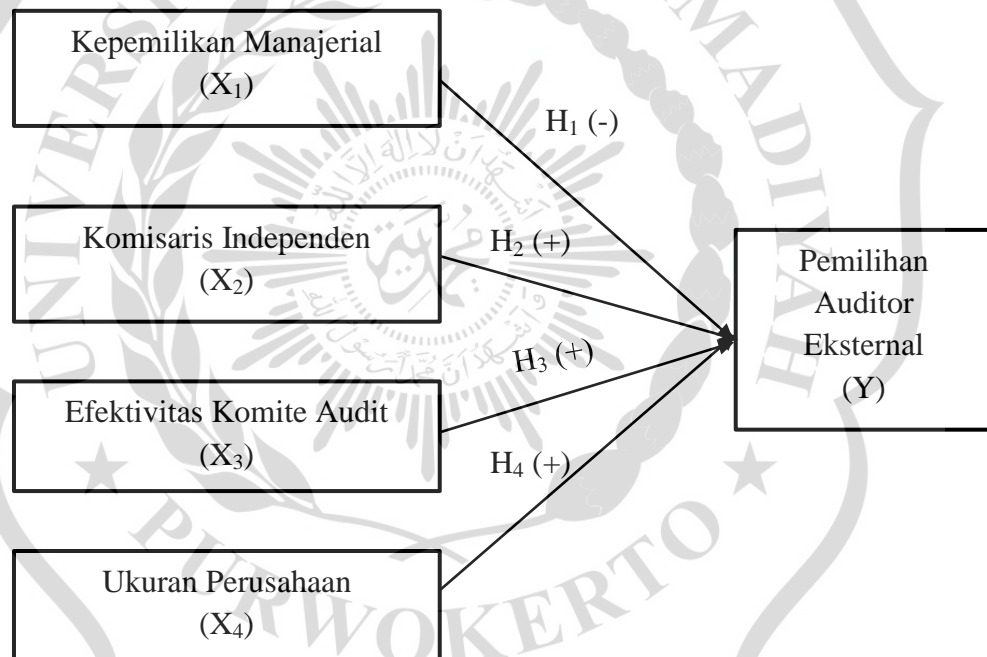
Komisaris independen merupakan elemen dari *good corporate governance* yang mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan semakin kuat tuntutan mereka kepada perusahaan untuk menggunakan auditor yang berkualitas (Setiawan, dkk, 2015).

Elemen lain dari *good corporate governance* adalah komite audit. Komite audit merupakan salah satu organ dari dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan pengajuan usulan penunjukan auditor eksternal (Trisnawati, 2015). Semakin efektif kinerja dari komite audit, maka semakin besar tuntutan komite audit untuk memilih auditor berkualitas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan (Efwita dan NR, 2019).

Semakin besar aset, pendapatan, modal ataupun jumlah karyawan menunjukkan semakin kompleks kegiatan dalam perusahaan. Pemilik perusahaan akan semakin sulit dalam mengendalikan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini pengawasan yang khusus akan sangat diperlukan, salah

satunya dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang berkualitas (Alfian & Suryansyah, 2017).

Pada penelitian ini pemilihan auditor eksternal digunakan sebagai variabel dependen yang menjadi pusat perhatian penelitian. Pemilihan auditor eksternal yang berkualitas dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diberikan manajemen telah terbebas dari salah saji material, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (P Nafasati & Indudewi, 2015).



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## D. Pengembangan Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal

Pratama dan Syafruddin (2013) menjelaskan bahwa masalah keagenan yang terjadi karena konflik kepentingan dan asimetri informasi akan memunculkan biaya keagenan (*agency cost*). Salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan atau *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Biaya keagenan bisa dikurangi apabila manajer memiliki kepemilikan saham yang tinggi dalam perusahaan karena lebih intensif dalam mengawasi kinerja perusahaan.

Manajer yang juga sebagai pemegang saham ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah (Pratama & Syafruddin, 2013). Maka pihak manajer secara alami akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikannya misalnya tindak kecurangan. Dengan demikian, bisa dikatakan juga bahwa dengan kepemilikan manajerial, tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Dampaknya, kualitas audit eksternal yang dibutuhkan oleh perusahaan akan menurun atau rendah.

Artati (2016), Dewi & Ratnadi (2014), serta Pratama & Syafruddin (2013) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap pemilihan auditor eksternal.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor eksternal**

## **2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal**

Menurut Setiawan, dkk (2015), komisaris independen mempunyai peran penting dalam mekanisme *corporate governance* yang bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan perusahaan oleh pemilik, sehingga komisaris independen berkepentingan untuk memastikan bahwa manajemen melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemegang saham. Semakin tinggi jumlah komisaris independen maka akan meningkatkan pengawasan dari kualitas laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi.

Ketika komisaris independen memiliki fungsi pengawasan bagi perusahaan, maka mereka memiliki ekspektasi yang tinggi bagi manajemen agar memberikan informasi yang andal bagi pemegang saham. Komisaris independen akan menghendaki adanya pengawasan

yang lebih baik dari pihak yang independen, yang diwujudkan dengan pemilihan auditor eksternal yang berkualitas (Setiawan, dkk, 2015).

Penelitian Setiawan, dkk (2015) dan Putra, dkk (2014) mencoba menginvestigasi pengaruh komisaris independen terhadap pemilihan auditor eksternal dan menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal**

### **3. Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugas komite audit adalah memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan auditor eksternal kepada dewan komisaris, untuk kemudian dipertimbangkan dan disetujui melalui rapat umum pemegang saham. Efektivitas komite audit dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yaitu aktivitas, ukuran dan kompetensi. Ketika perusahaan memiliki skor efektivitas komite audit yang tinggi maka mereka akan merekomendasikan auditor yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang tinggi kepada dewan komisaris untuk

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Trisnawati, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian & Suryansyah (2017), P Nafasati & Indudewi (2015), Trisnawati (2015) serta Putra (2014) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal**

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal**

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan (Dewi dan Ratnadi, 2014). Masalah keagenan akan meningkat sehubungan dengan ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan yang semakin besar. Menurut Alfian & Suryansyah (2017) semakin besar ukuran perusahaan dan tingkat kompleksitas perusahaan dapat meningkatkan risiko terjadinya *moral hazard* dalam perusahaan. *Moral hazard* terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menyebabkan kerugian bagi pemilik. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan fungsi monitoring melalui auditor eksternal yang berkualitas, baik untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan

(*fraud*) maupun dalam hal penyajian laporan keuangan (Trisnawati, 2015).

Alfian & Suransyah (2017) serta Rosita, dkk (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal**

